Layyina et al, *ARRUS Journal of Social Sciences and Humanities*, Vol. 5, No. 6 (2025)
https://doi.org/10.35877/soshum4516

ISSN: 2776-7930 (Print) / 2807-3010 (Online)

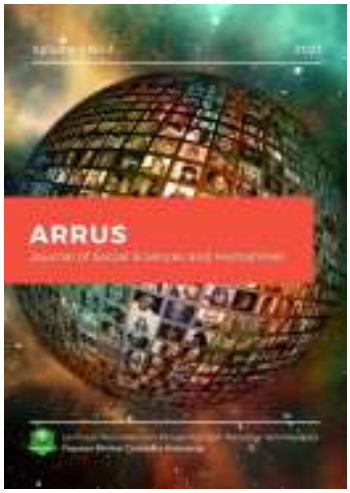

RESEARCH ARTICLE

Institutionalization of Indonesia's Dark Social Movement in the Campaign Against the 2025 TNI Law: Dynamics and Strategies of Digital Resistance

Tsalitsa Haura Layyina*, Nurain, Cindy, Aniqotul Ummah, Teddy Chrisprimanata Putra

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Jakarta, Indonesia.

*Corresponding author: Tsalitsa Haura Layyina, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Jakarta, Indonesia.

E-mail: 2310413092@mahasiswa.upnvj.ac.id
@gmail.com

Abstract: This research presents analysis of the Indonesian Dark Social Movement which was institutionalized as a digital resistance to the 2025 TNI Bill considered to jeopardize civilian supremacy and democratic principles. Initially, the movement was formed by public dissatisfaction with the military's growing role in the civilian sector and the opaque legislative process, then it evolved into a digital movement with a common identity, communication strategies, and organized cross-platform coordination. Through qualitative approaches via documentation studies and content analysis of a variety of digital materials, the research draws a map of the dynamics of digital resource mobilization, narrative formation, and coordination that characterize the movement's institutionalization process. The results indicate that Indonesia Gelap was able to convert sporadic actions into a structured movement through symbolic consistency, internal division of roles, strategic use of digital platforms, and partnering with civil society networks. Nonetheless, this evolution faced difficulties in the form of government repression, misinformation, and inconsistencies in digital involvement. This research demonstrates that the digital environment is not only the outlet of people's grievances but also the place where the adaptive and sustainable movement institutions are formed and this has consequences for social movements' overall strategies in the day of digital democracy.

Keywords: Indonesia Gelap, Institutionalization of Social Movements, Digital Activism.

1. INTRODUCTION

Perkembangan teknologi digital dalam dua dekade terakhir telah mengubah secara fundamental cara masyarakat mengekspresikan aspirasi politik dan melakukan perlawanan terhadap kebijakan negara. Ruang digital kini tidak hanya menjadi media komunikasi, tetapi juga arena politik baru dimana gerakan sosial bermetamorfosis menjadi kekuatan politik yang terorganisir dan strategis. Fenomena ini tampak jelas dalam kemunculan Gerakan Sosial Indonesia Gelap, yang menolak Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) Tahun 2025. RUU tersebut dinilai memberi ruang lebih besar bagi militer dalam urusan sipil, sehingga dianggap berpotensi mengancam prinsip supremasi sipil dan demokrasi konstitusional di Indonesia.

Gerakan Indonesia Gelap muncul sebagai bentuk perlawanan sipil yang memanfaatkan platform digital sebagai arena utama mobilisasi dan advokasi. Melalui kampanye daring yang

This open access article is distributed under a Creative Commons Attribution (CC-BY-NC) 4.0 license.

https://doi.org/10.35877/soshum4516

ISSN: 2776-7930 (Print) / 2807-3010 (Online)

masif di berbagai media sosial seperti Twitter/X, Instagram, dan YouTube, gerakan ini membangun narasi perlawanan terhadap dominasi militerisme dan memperjuangkan ruang demokrasi yang inklusif. Di sinilah letak keunikan gerakan ini: ia tidak sekadar menjadi reaksi spontan terhadap kebijakan pemerintah, tetapi berkembang menjadi gerakan sosial digital yang memiliki struktur, strategi, dan identitas kolektif yang kuat. Dengan simbol-simbol visual khas dan narasi terkoordinasi, Indonesia Gelap menunjukkan bagaimana aktivisme digital dapat terinstitusionalisasi menjadi kekuatan politik baru di ruang publik maya. Namun, dinamika strategi perlawanan digital yang dijalankan tidaklah sederhana. Ruang digital yang digunakan sebagai arena perlawanan juga sarat dengan polarisasi, disinformasi, dan manipulasi algoritmik, yang sering kali mengubah arah komunikasi politik menjadi emosional dan tidak produktif (Indonesiana, 2025). Algoritma media sosial mendorong konten yang paling banyak memicu interaksi, bukan yang paling faktual, sehingga menimbulkan tantangan tersendiri bagi gerakan sosial dalam menjaga kredibilitas dan efektivitas pesan. Dalam konteks ini, strategi digital Gerakan Indonesia Gelap menjadi menarik untuk diteliti karena memperlihatkan upaya menavigasi ruang digital yang kompleks antara membangun solidaritas publik dan menghadapi distorsi informasi.

Selain itu, dari perspektif teoritis, Gerakan Indonesia Gelap menunjukkan proses institusionalisasi yang patut dicermati. Berbeda dengan gerakan digital lain yang biasanya bersifat temporer dan tanpa struktur formal, Indonesia Gelap memperlihatkan upaya pembentukan struktur organisasi kolektif, kepemimpinan terdistribusi, serta mekanisme komunikasi yang terkoordinasi lintas platform. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran dari aktivisme spontan menuju gerakan sosial yang terinstitusionalisasi secara digital. Dengan kata lain, ruang digital bukan hanya tempat untuk menyuarakan protes, tetapi juga ruang pembentukan institusi sosial-politik baru yang berperan dalam memperkuat daya tahan gerakan.

Dari sisi dinamika internal, strategi perlawanan digital Indonesia Gelap memperlihatkan kombinasi antara mobilisasi sumber daya digital dan produksi narasi politik yang sistematis. Melalui kampanye tagar, konten visual, petisi online, serta kolaborasi dengan jaringan masyarakat sipil, gerakan ini mampu membangun resonansi publik yang luas. Dalam kerangka Teori Mobilisasi Sumber Daya (McCarthy & Zald, 2017), Indonesia Gelap berhasil mengelola sumber daya teknologi, informasi, dan jaringan sosial untuk mendukung gerakan mereka. Sementara dari perspektif Institusionalisasi Gerakan Sosial (Meyer & Tarrow, 1998), strategi-strategi ini menandai tahap transisi gerakan dari bentuk reaktif menuju struktur yang stabil, adaptif, dan berkelanjutan. Urgensi penelitian ini terletak pada dua hal. Pertama, secara empiris, fenomena Indonesia Gelap mencerminkan tantangan baru dalam relasi antara masyarakat sipil dan negara di era digital, khususnya dalam isu sensitif seperti supremasi sipil dan peran militer. Kedua, secara teoritis, penelitian ini penting untuk memperkaya kajian tentang institusionalisasi gerakan sosial digital, yang masih relatif baru dalam konteks Indonesia. Melalui analisis dinamika dan strategi perlawanan digital Indonesia Gelap, penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan bagaimana gerakan sosial mampu beradaptasi dengan ekosistem digital yang cair namun sarat potensi politis, serta bagaimana mereka membangun legitimasi dan daya tahan institusional di tengah tekanan politik yang kuat.

Dengan demikian, penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk memahami lebih dalam bagaimana Gerakan Sosial Indonesia Gelap membangun, mengelola, dan meneguhkan strategi perlawanan digitalnya dalam menentang RUU TNI 2025, serta bagaimana proses itu mencerminkan transformasi institusional gerakan sosial di era demokrasi digital Indonesia.

2. Literature Review

This open access article is distributed under a Creative Commons Attribution (CC-BY-NC) 4.0 license.

https://doi.org/10.35877/soshum4516

ISSN: 2776-7930 (Print) / 2807-3010 (Online)

2.1. *Penelitian Terdahulu*

Gerakan Indonesia Gelap merupakan wujud protes yang dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai kurang menguntungkan rakyat dan berpotensi memberikan ruang lebih besar bagi militer dalam urusan sipil. Gerakan ini menolak keras RUU TNI 2025 yang dianggap bisa melemahkan demokrasi dan memperkuat kendali militer di masyarakat sipil. Melalui demonstrasi dan kampanye digital yang tersebar luas, gerakan ini memperlihatkan kekuatan mobilisasi masyarakat sipil dalam menentang kebijakan yang kontroversial tersebut (Triwikrama, 2025). Dalam hal penggunaan ruang digital, media sosial menjadi platform utama untuk propaganda dan penggalangan dukungan bagi gerakan Indonesia Gelap. Media seperti Instagram, Twitter, dan Facebook digunakan untuk menyebarkan pesan dan membangun identitas kelompok secara digital dengan simbol-simbol yang kuat. Metode ini membentuk jaringan sosial yang besar dan efektif dalam membangun solidaritas serta meningkatkan tekanan pada pemerintah (Triwikrama, 2025). Hal ini menggambarkan perubahan cara gerakan sosial tradisional menjadi lebih interaktif dan dinamis dalam ranah digital (Kartika, 2017).

Namun, perlawanan digital juga menghadapi masalah polarisasi dan penyebaran informasi yang salah yang dipicu oleh algoritma media sosial. Algoritma tersebut cenderung menampilkan konten yang paling banyak mendapat interaksi, sehingga seringkali memperkuat narasi emosional yang belum tentu benar. Kondisi ini menyebarkan disinformasi sekaligus memperkuat semangat solidaritas, menciptakan dua sisi konflik digital dalam konteks perjuangan sosial di Indonesia (Indonesiana, 2025). Oleh sebab itu, penting untuk meningkatkan literasi digital agar gerakan sosial tetap efektif dan beretika. Gerakan Indonesia Gelap juga menunjukkan tanda-tanda institusionalisasi dengan membentuk struktur organisasi yang terkoordinasi dan kepemimpinan kolektif. Mereka berupaya melibatkan berbagai kalangan masyarakat sipil untuk berperan aktif dalam demokrasi digital yang sedang tumbuh. Dengan demikian, gerakan ini bukan hanya reaksi sesaat, melainkan sudah menjadi struktur yang mampu memperkuat posisi tawar dalam dialog politik dan mempertegas tuntutan terhadap RUU TNI yang dianggap mengancam hak sipil serta demokrasi Indonesia (Triwikrama, 2025).

Masih ada kekurangan penelitian yang membahas secara khusus bagaimana proses pembentukan struktur organisasi dan institusionalisasi dalam gerakan Indonesia Gelap berlangsung, terutama dalam konteks penggunaan ruang digital. Selain itu, belum banyak kajian yang mengulas bagaimana gerakan ini mengatasi tantangan seperti polarisasi dan penyebaran informasi yang salah melalui strategi digitalnya. Penting juga untuk meneliti dinamika di dalam organisasi dan peran kepemimpinan kolektif dalam menjaga solidaritas serta menangani konflik yang muncul di ranah digital, karena hal ini sangat mempengaruhi keberlanjutan dan keberhasilan gerakan dalam menolak RUU TNI 2025. Oleh karena itu, penelitian ini akan mencoba mengisi kekosongan tersebut dengan fokus pada proses institusionalisasi dan strategi perlawanan digital, guna memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang adaptasi gerakan sosial tradisional ke dalam dunia digital di Indonesia.

2.2. *Teori*

Teori Mobilisasi Sumber Daya (Resource Mobilization Theory)

Teori Mobilisasi Sumber Daya yang dikembangkan oleh (McCarthy & Zald, 2017) menjadi kerangka penting dalam memahami dinamika gerakan sosial kontemporer, khususnya dalam kampanye digital Indonesia Gelap melawan RUU TNI tahun 2025. Teori ini menjelaskan bahwa keberhasilan suatu gerakan sosial tidak semata-mata bergantung pada ketidakpuasan kolektif atau grievances masyarakat, melainkan pada kemampuan organisasi gerakan dalam mengorganisir dan memobilisasi berbagai sumber daya yang tersedia. Dalam era digital seperti yang dialami oleh gerakan Indonesia Gelap, sumber daya tersebut mengalami transformasi signifikan, mencakup infrastruktur teknologi digital, jaringan komunikasi virtual, kredibilitas informasi yang disebarkan, serta partisipasi massa yang dimobilisasi melalui platform online.

This open access article is distributed under a Creative Commons Attribution (CC-BY-NC) 4.0 license.

https://doi.org/10.35877/soshum4516

ISSN: 2776-7930 (Print) / 2807-3010 (Online)

Relevansi teori ini terhadap penelitian institusionalisasi gerakan sosial Indonesia Gelap terletak pada pemahaman bahwa gerakan digital memerlukan strategi mobilisasi sumber daya yang berbeda dari gerakan konvensional. Indonesia Gelap memanfaatkan platform digital sebagai sumber daya strategis utama dalam kampanye tolak RUU TNI, di mana akses terhadap teknologi, kemampuan mengelola informasi, dan jaringan komunikasi menjadi modal krusial. Menurut teori ini, gerakan sosial yang efektif memerlukan organisasi formal atau semi-formal yang mampu mengoordinasikan aksi kolektif, kepemimpinan strategis yang dapat mengarahkan gerakan sesuai tujuan, akses terhadap sumber daya komunikasi untuk menyebarkan pesan dan narasi, kemampuan membangun koalisi dengan berbagai aktor strategis, serta strategi mobilisasi yang terencana dan sistematis. Dalam institusionalisasi, kemampuan Indonesia Gelap mengelola sumber daya digital ini menjadi indikator penting dalam mengukur transformasi gerakan dari bentuk protes spontan menuju struktur yang lebih terorganisir dan berkelanjutan.

2.3. Konsep yang Digunakan

Konsep Institusionalisasi (Meyer, D.S. and Tarrow, 1998) mendefinisikan institusionalisasi gerakan sosial sebagai proses transformasi fundamental dari gerakan berbasis protes spontan dan taktik disruptif menuju struktur organisasi yang lebih formal, stabil, dan berkelanjutan. Proses institusionalisasi ini merupakan tahap kritis dalam siklus hidup gerakan sosial, di mana gerakan tidak lagi bergantung pada momentum sesaat atau figur karismatik tertentu, melainkan telah mengembangkan kapasitas organisasional yang memungkinkan keberlangsungan aksi kolektif dalam jangka panjang. Dalam penelitian tentang Indonesia Gelap dan kampanye tolak RUU TNI tahun 2025, konsep institusionalisasi ini menjadi kerangka analitis sentral untuk memahami bagaimana gerakan digital mengalami transformasi dari aksi protes spontan di media sosial menjadi entitas yang lebih terstruktur dan berpengaruh. Institusionalisasi gerakan Indonesia Gelap tidak hanya diukur dari formalisasi struktur organisasional dalam pengertian konvensional, tetapi juga dari bagaimana gerakan mengembangkan kehadiran digital yang konsisten, membangun ekosistem narasi yang koheren, menjalin jaringan aliansi strategis, dan menciptakan repertoar aksi digital yang terstandarisasi namun tetap adaptif terhadap dinamika politik yang cepat berubah.

3. Research Method and Materials

Metode yang digunakan dalam penelitian ini berbasis pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan fokus pada studi dokumentasi dan analisis isi dari berbagai data digital. Penelitian ini memanfaatkan dokumen dan materi digital seperti postingan media sosial, video, artikel, serta sumber tertulis dari kampanye Tolak RUU TNI 2025 yang beredar di dunia maya. Data-data tersebut dikumpulkan secara sistematis untuk kemudian dianalisis guna memahami bagaimana proses institusionalisasi gerakan sosial Indonesia Gelap berlangsung dan strategi perlawanan yang mereka jalankan secara digital (Hasanah, 2025; Warunayama, 2025). Pendekatan ini relevan untuk mempelajari perubahan gerakan sosial yang kini banyak bermedia di ruang digital, di mana platform daring menjadi arena utama mobilisasi dan ekspresi kolektif. Dengan metode kualitatif ini, penelitian dapat menggambarkan secara mendalam bentuk dan cara gerakan ini menggunakan teknologi digital sebagai sarana perlawanan. Melalui analisis isi, pola-pola komunikasi, narasi utama, dan simbol-simbol yang dihadirkan secara digital dapat dipetakan sehingga memberikan gambaran utuh mengenai strategi digital yang dipakai oleh gerakan dalam menolak RUU TNI 2025 (Fatmawati, 2023; Hasanah, 2025).

4. Results and Discussion

4.1. Dinamika Gerakan Sosial Indonesia Gelap di Era Digital

Gerakan Sosial Indonesia Gelap muncul sebagai reaksi masyarakat terhadap Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) tahun 2025 yang dianggap berpotensi menggeser supremasi sipil dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. RUU ini memperluas peran militer ke ranah yang sebelumnya menjadi urusan sipil,

This open access article is distributed under a Creative Commons Attribution (CC-BY-NC) 4.0 license.

https://doi.org/10.35877/soshum4516

ISSN: 2776-7930 (Print) / 2807-3010 (Online)

seperti pengawasan siber dan keamanan infrastruktur penting, sehingga memicu kekhawatiran akan kembalinya peran militer yang dominan seperti pada masa Orde Baru. Lahir dari latar belakang sosial-politik yang kompleks, gerakan ini menjadi bentuk penolakan tegas terhadap kurangnya transparansi dalam proses pengesahan RUU yang dilakukan oleh DPR tanpa konsultasi luas dengan masyarakat. Situasi ini memicu gelombang aksi protes besar, khususnya di kalangan mahasiswa yang menilai langkah tersebut sebagai kemunduran terhadap nilai-nilai demokrasi dan perlindungan hak sipil yang telah diperjuangkan sejak era Reformasi 1998. Protes yang masif ini memperlihatkan adanya ketegangan antara kebijakan pemerintah yang memperkuat militer dengan keinginan publik akan pemerintahan sipil yang kuat dan demokratis (Prabowo et al., 2025).

Motivasi di balik gerakan ini bersumber dari kekhawatiran kolektif bahwa RUU tersebut dapat mengancam kebebasan sipil dan memperkuat dominasi militer di ranah sipil yang semestinya independen. Para pendukung gerakan, terutama mahasiswa sebagai agen perubahan, dosen, aktivis masyarakat sipil, dan komunitas digital yang menggunakan platform media sosial untuk mengorganisir dan menyuarakan pendapatnya, menjadi tulang punggung penting kampanye penolakan ini. Mereka mengenakan simbol pakaian gelap sebagai tanda solidaritas dan peringatan atas potensi ancaman terhadap demokrasi. Aksi-aksi mereka berlangsung secara masif di berbagai lembaga pendidikan dan ruang publik, seperti demonstrasi di gedung DPR dan di daerah-daerah seperti Blitar serta Lumajang. Di sisi digital, petisi daring dan kampanye hashtag seperti #IndonesiaGelap menjadi alat ampuh untuk memperluas jaringan dukungan dan memperkuat tekanan politik terhadap pemerintah dan DPR. Pendekatan ini menunjukkan bahwa gerakan ini bukan sekadar reaksi instan, melainkan sebuah identitas kolektif yang menyatukan berbagai elemen masyarakat dalam melawan kebijakan yang dianggap otoriter (Satria & Wicaksana, 2025).

Dalam konteks era digital, Gerakan Indonesia Gelap menunjukkan karakteristik yang berbeda dari gerakan sosial tradisional yang biasanya mengandalkan aksi fisik dan tatap muka. Media sosial menjadi medan utama perjuangan mereka, memungkinkan proses mobilisasi menjadi lebih cepat dan jangkauannya lebih luas tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Simbolisme visual seperti pemakaian pakaian serba hitam juga dengan cepat menyebar dan diadopsi melalui platform-platform seperti X, Instagram, dan YouTube, membangun narasi kolektif yang kuat di ranah maya. Penggunaan media digital ini bukan hanya soal penyebaran informasi, melainkan juga tentang bagaimana membentuk opini publik dan meretas wacana dominan pemerintah melalui strategi komunikasi yang kritis dan kreatif. Gerakan ini menjadi contoh dari bentuk baru perlawanan sosial yang memadukan kegiatan fisik di lapangan dengan aksi maya yang terstruktur, menandai transformasi cara berpolitik di Indonesia yang semakin terdigitalisasi (Wulandari, 2025).

4.2. *Proses Institusionalisasi Gerakan Indonesia Gelap dalam Dinamika Perlawanan*

Proses institusionalisasi dalam Gerakan Indonesia Gelap berkembang secara signifikan seiring meningkatnya eskalasi penolakan terhadap RUU TNI 2025. Pada fase awal, gerakan ini tampil sebagai reaksi spontan terhadap proses legislasi tertutup yang dinilai berpotensi melemahkan prinsip supremasi sipil. Namun, seperti dicatat oleh berbagai studi tentang gerakan digital, fase spontan sering kali menjadi pintu masuk menuju pembentukan struktur organisasi yang lebih mapan, terutama ketika gerakan memasuki arena politik jangka panjang. Hal ini terlihat jelas dalam Indonesia Gelap ketika konsistensi narasi, simbol visual, dan pola tindakan kolektif mulai menunjukkan stabilitas dan repetisi yang merupakan ciri utama institusionalisasi (Meyer & Tarrow, 1998).

Tanda-tanda institusionalisasi mulai terlihat melalui pengembangan identitas kolektif yang kuat, misalnya dengan penggunaan pakaian serba hitam, visual kampanye yang seragam, dan tagar seperti #IndonesiaGelap yang menjadi jangkar narasi perlawanan. Identitas digital ini memegang peran penting dalam membangun legitimasi dan memperkuat rasa kebersamaan di antara para partisipan, sebagaimana ditunjukkan oleh Castells (2012) bahwa konsistensi simbolik dalam gerakan daring mampu menciptakan "ruang makna" yang tersusun secara

This open access article is distributed under a Creative Commons Attribution (CC-BY-NC) 4.0 license.

https://doi.org/10.35877/soshum4516

ISSN: 2776-7930 (Print) / 2807-3010 (Online)

kolektif. Pada titik ini, Indonesia Gelap tidak lagi sekadar bereaksi, tetapi telah membangun basis wacana dan identitas yang direproduksi secara terus-menerus melalui berbagai platform. Transformasi berikutnya dapat dilihat pada perubahan struktur internal dan cara kerja gerakan. Meski tidak berbentuk organisasi formal, Indonesia Gelap menunjukkan mekanisme koordinasi yang semakin sistematis. Pembagian peran dalam tim riset, produksi konten, desain grafis, keamanan digital, hingga tim amplifikasi tagar menandakan adanya division of labor yang merupakan ciri institusionalisasi modern (McCarthy & Zald, 2017). Koordinasi lintas platform Twitter untuk agitasi cepat, Instagram untuk kampanye visual, YouTube untuk edukasi mendalam, serta Telegram/Discord untuk komunikasi tertutup memperlihatkan adanya konsolidasi strategi komunikasi yang matang (Hasanah, 2025; Warunayama, 2025). Bahkan, penyusunan SOP informal seperti pedoman verifikasi informasi, standar desain, dan protokol keamanan digital menunjukkan rutinisasi praktik yang memperkuat daya tahan gerakan (Anshori & Nadiyya, 2023).

Namun, proses institusionalisasi ini tidak berjalan tanpa hambatan. Tantangan terbesar berasal dari represi negara, terutama melalui penggunaan UU ITE, pembatasan akun, serangan siber, serta pelabelan negatif terhadap aktivis digital. Ketegangan seperti ini telah banyak dicatat dalam kajian politik digital di Indonesia, di mana negara sering menggunakan instrumen hukum dan teknologi untuk membatasi ruang gerak gerakan sosial daring (Indonesiana, 2025; Hasanah, 2025). Selain represi eksternal, Indonesia Gelap juga menghadapi konflik internal, terutama dalam perbedaan strategi antara kelompok moderat dan radikal. Konflik ini menggambarkan dinamika klasik dalam institusionalisasi gerakan, ketika proses konsolidasi sering kali disertai tarik-menarik arah, narasi, dan metode aksi (Meyer & Tarrow, 1998). Tantangan keberlanjutan juga hadir akibat sifat mobilisasi digital yang rentan terhadap kejenuhan, fluktuasi algoritma, serta menurunnya partisipasi ketika momentum melemah (Fatmawati, 2023).

Di tengah dinamika tersebut, gerakan ini menghadapi keputusan strategis: apakah akan berkembang menjadi organisasi formal atau tetap memilih bentuk informal berbasis jejaring. Indikasi menuju formalisasi terlihat melalui stabilitas struktur kerja, konsistensi produksi narasi, serta kemampuan membangun aliansi dengan organisasi masyarakat sipil dan akademisi (Prabowo et al., 2025). Jika bergerak ke arah organisasi resmi, Indonesia Gelap dapat memperkuat legitimasi advokasinya melalui advokasi hukum, riset kebijakan, dan dialog dengan aktor formal negara. Namun, model ini berpotensi membuat gerakan lebih rentan terhadap represi negara dan kehilangan fleksibilitas dua karakter yang menjadi kekuatan utama gerakan digital (Castells, 2012). Di sisi lain, memilih untuk tetap informal memungkinkan gerakan memanfaatkan keunggulan jaringan cair, anonimitas, adaptabilitas cepat, serta kemampuan memperluas partisipasi publik tanpa hambatan struktural yang kaku (Wulandari, 2025). Dengan demikian, proses institusionalisasi Gerakan Indonesia Gelap tidak mengarah pada pembentukan organisasi formal, tetapi lebih pada model institusionalisasi digital yang bersifat cair, terdesentralisasi, dan berbasis jejaring. Gerakan ini memperlihatkan bahwa institusionalisasi pada gerakan digital dapat terjadi tanpa kehadiran lembaga fisik, tetapi melalui rutinitas naratif, konsistensi koordinasi, dan jaringan kolaboratif yang stabil. Model ini menegaskan bahwa Indonesia Gelap telah berubah dari aksi spontan menjadi kekuatan sosial-politik yang terorganisir di ruang digital, sekaligus mencerminkan transformasi bentuk gerakan sosial Indonesia di era demokrasi digital.

5. Conclusion

Penelitian menunjukkan bahwa Gerakan Sosial Gelap Indonesia sebenarnya telah berhasil mengubah arahnya dari protes spontan terhadap RUU TNI 2025 menjadi gerakan digital yang telah diinstitusionalisasikan melalui kombinasi pengelolaan sumber daya teknologi, pembentukan identitas kolektif, dan konsolidasi narasi dan praktik kampanye yang konsisten. Proses institusionalisasi gerakan sosial di era digital tidak selalu berarti struktur formal, hal ini dapat terjadi melalui koordinasi lintas platform yang kokoh, produksi diskursus secara teratur, dan keberadaan kolaborasi jaringan yang berkelanjutan. Pembatasan radikal dan seringkali

This open access article is distributed under a Creative Commons Attribution (CC-BY-NC) 4.0 license.

https://doi.org/10.35877/soshum4516

ISSN: 2776-7930 (Print) / 2807-3010 (Online)

tidak masuk akal dari negara, polusi digital, informasi menyesatkan, dan dinamika di dalam gerakan secara rutin menguji dan menantang klaim dan ketahanan Indonesia Gelap, namun gerakan ini tetap mempertahankan klaimnya dan menggunakan strategi yang ditargetkan dan adaptif untuk menggerakkan sumber daya digital. Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa ruang digital kini tidak hanya berfungsi sebagai media ekspresi, tetapi juga sebagai arena untuk pembentukan institusi gerakan yang telah memperoleh pengaruh politik yang nyata. Gerakan-gerakan yang serupa dengan ini disarankan untuk memperkuat mekanisme verifikasi informasi, memperluas kolaborasi dengan aktor-aktor masyarakat sipil, dan merancang strategi mitigasi risiko digital agar ketahanan gerakan dapat terjaga dengan lebih baik dalam jangka panjang.

References

UU RI No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Jakarta: Sekretariat Negara.

Kartika, A. (2017). Gerakan Sosial Digital "Warga Bantu Warga" Sebagai Respon Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi. Jurnal Universitas Brawijaya.

Mahfud, M. D. (2024). Pernyataan dalam diskusi Indonesia Lawyers Club mengenai gerakan Indonesia Gelap.

Triwikrama. (2025). Analisis Gerakan Sosial Indonesia Gelap dalam Kampanye Tolak RUU TNI Tahun 2025. Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial, 10(11), 31-40. https://doi.org/10.9963/1nfxhd84

Indonesiana. (2025). Peran Algoritma Media Sosial dalam Dinamika Unjuk Rasa Indonesia. Indonesiana.id.

Fatmawati, I. (2023). Peran ruang digital sebagai transformasi gerakan sosial: Studi kualitatif. Jurnal Analisis Sosiologi, 15(1), 45-62.

Hasanah, A. N. (2025). Transformasi gerakan sosial di ruang digital. Jurnal Pendidikan Sosiologi, 1(1), 1-12.

Warunayama, I. (2025). Bentuk gerakan sosial baru melalui ruang digital. Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial, 7(11), 71-80. https://doi.org/10.6578/triwikrama.v7i11.12340

McCarthy, J. D., & Zald, M. N. (2017). Resource mobilization and social movements: A partial theory. In Social Movements in an Organizational Society: Collected Essays (pp. 15–46). https://doi.org/10.4324/9781315129648

Meyer, D.S. and Tarrow, S. (1998). A Movement Society: Contentious Politics for.

Anshori, I., & Nadiyya, F. A. A. (2023). Peran Ruang Digital Sebagai Transformasi Gerakan Aksi Sosial Mahasiswa Melalui Platform Sosial Media. Jurnal Analisa Sosiologi, 12(2), 343–362. https://doi.org/10.20961/jas.v12i2.68981

Anshori, F., & Nadiyya, L. (2023). Digital Movements and the Institutionalization of Online Activism in Indonesia. Jakarta: LP3ES.

Castells, M. (2012). Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age. Cambridge: Polity Press.

Hasanah, R. (2025). Analisis Strategi Gerakan Sosial Digital dalam Menolak Kebijakan Pemerintah. Jurnal Politik Digital Indonesia, 5(1), 22–41.

Risdwiyanto, A. & Kurniyati, Y. (2015). Strategi Pemasaran Perguruan Tinggi Swasta di Kabupaten Sleman Yogyakarta Berbasis Rangsangan Pemasaran. Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship, 5(1), 1-23. http://dx.doi.org/10.30588/SOSHUMDIK.v5i1.142.

Bator, R. J., Bryan, A. D., & Schultz, P. W. (2011). Who Gives a Hoot?: Intercept Surveys of Litterers and Disposers. Environment and Behavior, 43(3), 295–315. https://doi.org/10.1177/0013916509356884.

Prabowo, T. et al. (2025). Analisis Gerakan Sosial Indonesia Gelap dalam Kampanye Tolak RUU TNI Tahun 2025. Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial, 10(11), 31-40.

Satria, W., & Wicaksana, K. (2025). Tolak Legislasi Gelap: Membahas RUU TNI Inkonstitusional. LaporIklim. https://laporiklim.wargaberdaya.org

Triwikrama Jurnal. (2025). Analisis Gerakan Sosial Indonesia Gelap. Cahaya Ilmu Bangsa Institute. https://ejournal.cahayailmubangsa.institute

Wulandari, S. (2025). Visual Arts of Sukatani Band on Social Media as Political Expression in Indonesia Gelap Movement. Journal of Social Sciences and Humanities, 898. https://journal.jfpublisher.com

This open access article is distributed under a Creative Commons Attribution (CC-BY-NC) 4.0 license.